

**SISTEM PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI DESA
SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK DI TINJAU MENURUT
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE, Sy)**



DISUSUN OLEH:

TITIN SUPRIHATIN
10825003807

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIMRIA UPEKANBARU
2013/1434 H**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat dan perjuangan beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Strata Satu, dan semua itu tidak terlepas pula bantuan dari berbagai pihak baik itu berbentuk moril maupun materi. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Tobi'in (Alm) dan ibunda Salimah tercinta, serta kakanda tersayang, serta keluarga yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN SUSKA RIAU Pekanbaru.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan. MA, M. Pd. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan bapak Pudek I, II, III serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
4. Bapak Mawardi, S.Ag., M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag. selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Drs. Hj. Nurhasanah, MA selaku penasehat Akademis, yang telah mengorbankan waktunya kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Amrul Muzan, MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak DR. Heri Sunandar, M.CI dan Bapak Jonnius, SE, MM selaku Penguji I dan II serta Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, MA dan Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH. MH selaku Ketua dan Sekretaris panitia ujian sarjana.
8. Bapak kepala perpustakaan Al Jamiah UIN SUSKA RIAU Pekanbaru beserta stafnya, yang memberikan kemudahan fasilitas berupa buku-buku kepada penulis.
9. Bapak Kepala Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak beserta stafnya yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
10. Bapak dan Ibu pengelola dan pemilik lahan yang ada di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam terutama yang melakukan kerjasama ini, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas simpatinya kepada penulis. Semoga kita bisa menggunakan ilmu di jalan yang benar dan bermanfaat, Aamiin...

Selanjutnya penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri.

Penulis

Titin Suprihatin

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: **“SISTEM PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yaitu berupa pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pekerja atau penggarap untuk digarap atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan kosong tersebut dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Desa Sri Gading, untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading serta untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil pertanian di Desa Sri Gading sudah relevan menurut ekonomi Islam.

Subjek penelitian ini adalah pemilik lahan dan penggarap lahan. Objek dalam penelitian ini adalah sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan pemanfaatan lahan kosong yang berjumlah 30 orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel yang melakukan sistem pemanfaatan lahan yaitu pemilik lahan 5 orang dan petani penggarap 10 orang. Sehingga jumlah populasi sebanyak 15 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Data penelitian diperoleh dari semua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan, dengan cara melakukan observasi, wawancara dan menyebarkan angket. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, induktif, dan deskriptif.

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan maka penulis berpendapat bahwa terdapat empat macam sistem akad pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading yaitu: (1). Sistem sewa, (2). Sistem bagi dua/paroan, (3) Sistem bagi tiga, (4). Sistem tolong menolong/pinjam gratis. Adapun yang menjadi kendala dalam sistem pemanfaatan lahan kosong ini yaitu kurangnya lahan, kurangnya tenaga dan adanya perselisihan. Berdasarkan ekonomi Islam pemanfaatan lahan kosong ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai, yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu sistem sewa, sistem bagi tiga dan sistem tolong menolong/pinjam gratis, sedangkan yang tidak sesuai yaitu sistem bagi dua karena bagi dua yang terjadi berdasarkan pembagian lahan yang dibagi dua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penelitian	16
 BAB II : TINJAUAN UMUM DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK	
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	18
B. Agama dan Pendidikan	20
C. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat	23
 BAB III : TINJAUAN TEORI BENTUK-BENTUK AKAD PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DALAM EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian Akad,	26
B. Syirkah,	28
C. Mudharabah atau Qiradh,	30
D. Ariyah.....	32

E. Muzara'ah	34
F. Mukhabarah.....	36
G. Musaqah	43

BAB IV: SISTEM PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Bagaimana Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?...	46
B. Apa Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?.....	60
C. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?	65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 : Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	19
Tabel II. 2 : Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur	19
Tabel II. 3 : Klasifikasi Penduduk Menurut Agama	21
Tabel II. 4 : Jumlah Sarana Ibadah.....	21
Tabel II. 5 : Jumlah Sarana Pendidikan.....	22
Tabel II. 6 : Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk	23
Tabel II. 7 : Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	24
Tabel IV. 1 : Masa Pemanfaatan Lahan Kosong	53
Tabel IV. 2 : Tentang Izin Kepada Pemilik Lahan	54
Tabel IV. 3 : Tentang Bentuk Perjanjian Pemanfaatan Lahan Kosong	54
Tabel IV. 4 : Tentang Dampak Pemanfaatan Lahan Kosong	55
Tabel IV. 5 : Sistem Yang Digunakan Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong	56
Tabel IV. 6 : Tentang Kejelasan Pembagian Hasil Ketika Akad.....	57
Tabel IV. 7 : Yang Diuntungkan Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong.....	58
Tabel IV. 8 : Tempat Pemanfaatan Lahan Kosong Cukup Strategis	59
Tabel IV. 9 : Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong	60
Tabel IV. 10 : Tentang Perselisihan Selama Pemanfaatan Lahan Kosong.	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dalam segala urusan kepentingan hidup satu sama lain, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, atau pun bercocok tanam, baik dalam urusan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan umum. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.¹

Industri yang terus berkembang saat ini adalah industri rumah tangga, industri ini sangat diharapkan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi mata pencaharian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan industri pedesaan merupakan industri yang mempunyai peranan penting dalam menunjang lajunya pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan industri terus bertambah sejalan dengan perkembangan daerah.²

Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya.³

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 4.

²Fahri Yasin, *Agribisnis Riau Perkebunan Berbasis Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Press, 2003), Cet. ke-1, h. 186.

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Cet. ke-V, h. 7.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan makmur, serta hubungan satu sama lain akan menjadi erat, akan tetapi karena adanya sifat tamak yang masih melekat pada diri manusia, yang masih suka mementingkan diri sendiri, agar hak masing-masing tidak sampai menjadi sia-sia dan juga untuk menjaga kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah kehidupan manusia juga akan terjamin dengan sebaik-baiknya, perselisihan dan saling dendam tidak akan terjadi.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong antar satu dengan yang lainnya, dengan berdasarkan pada prinsip *at-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 2, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْتَمِدُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا يُؤْتِي السُّرْلَ الْغَافِلِينَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْتَمِدُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا يُؤْتِي السُّرْلَ الْغَافِلِينَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْتَمِدُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا يُؤْتِي السُّرْلَ الْغَافِلِينَ﴾

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat kejelekan dan pelanggaran..."*.⁴

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia maka pemanfaatan lahan kosong sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas, misalnya: pemanfaatan lahan kosong, dan lain-lain.

⁴Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 106.

Islam mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi. Dalam tulisan klasik, tanah dianggap sebagai suatu faktor produksi penting, yang mencakup semua sumber daya alam, yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi kesuburan tanah, air, mineral dan sebagainya. Memang benar tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Al-Qur'an maupun Sunah Nabi mengenai hal ini sangat jelas yaitu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik.

Baik *Al Qur'an* maupun *Sunnah* banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian kitab suci al-Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi perkebunan dan sebagainya dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat As-Sajadah Ayat 27.⁵



Artinya : *Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasannya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?*

⁵*Ibid*, h. 417.

Nash di atas dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan dorongan bagi siapa saja untuk membudidayakan tanah kosong untuk pertanian atau tujuan lainnya terhadap tanah yang di biarkan terlantar, dalam kasus kepemilikan tanah, Rasulullah SAW telah melarang seseorang memiliki tanah namun dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi hal ini akan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa saja yang mampu berusaha. Suatu riwayat yang bersumber dari Aisyah diceritakan bahwa Nabi Saw, pernah berkata:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لَهُ حَافِدٌ فَهُوَ أَحَقُّ» .
قَالَ الْعُرْوَةُ قُضِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيُخْلَفُ

Artinya : ”Siapa saja yang mengerjakan tanah tak bertuan akan lebih berhak atas tanah itu”. (HR. Bukhari).⁶

Karena Islam mengakui pemilik tanah bukan penggarap, maka diperkenankan memberikan kepada orang lain untuk menggarapnya dengan menerima sebagian hasilnya atau uang, akan tetapi bersamaan dengan itu dianjurkan agar seorang yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudaranya yang miskin.⁷ Berdasarkan landasan hukum Mukhabarah adalah sabda Nabi SAW :

- عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْبِرُ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتْ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمَخَابِرَةِ . فَقَالَ لَا نَعْمَرُ وَأَخْبَرْنَا عَنْهُمْ مَبْدَلُ كَيْعِنَا بِنِعَابِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَهَى عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ «يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهْمَا نِيًّا خَذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا»

Artinya : “Dari Tawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amr berkata : ‘Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau

⁶ Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, juz 8, (Mesir: Wuzarah al-Auqaf.tt), h. 415.

⁷M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 56.

tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw, telah melarang Mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu". (HR. Muslim).⁸

Kebijakan seperti ini semakin tampak jelas pengaruhnya dalam kondisi sekarang tatkala kita mendapatkan banyak lahan pertanian di berbagai negeri Muslim yang tidak dikerjakan atau dimanfaatkan selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini disebabkan oleh sistem penguasaan tanah yang buruk yang telah mendorong tumbuhnya kekuasaan pemilik tanah dan sejenisnya. Karena kekayaan yang dimiliki menjadi tidak optimal dimanfaatkan sehingga merugikan pemilik maupun masyarakat secara keseluruhan.

Ketentuan terhadap pemanfaatan kekayaan juga mencakup tata cara memanfaatkannya. Islam berharap agar siapa pun yang melakukan suatu perbuatan termasuk memanfaatkan kekayaan harus dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin.

Kemudian, agar sistem pemanfaatan lahan kosong ini dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu atau tidak memiliki lahan sendiri, karena pemanfaatan lahan kosong ini kerjasama memanfaatkan lahan kosong yang terlantar atau berupaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan untuk menambah pendapatan.

⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.5, (Beirut: Dar al-Jail.tt), h. 25.

Secara etimologi kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu *oikonomia*, *oikos* berarti rumah dan *nomos* berarti tangga, karena itu ekonomi diterjemahkan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga.⁹

Sistem ekonomi Islam tidak membahas masalah pengembangan harta, melainkan hanya membahas tentang pengembangan kepemilikan. Dalam hal ini, Islam menyerahkan masalah pengembangan harta tersebut kepada individu agar mengembangkannya dengan *uslub* dan faktor produksi apa saja yang menurutnya layak dipergunakan untuk mengembangkan harta tersebut.¹⁰

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil'alam.¹¹

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan ekspor tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan.¹²

Sedangkan menurut Paul. A. Samuel, salah seorang ahli ekonomi terkemuka memberikan definisi, ilmu ekonomi merupakan studi tentang individu dan masyarakat dalam pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dan sumber-sumber terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk

3. ⁹Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), Cet. ke-1, h.

¹⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 163.

¹¹ Muslich, *Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2007), h. 39.

¹² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. ke-1, h. 31.

kepentingan konsumen sekarang dan dimasa yg akan datang individu dan golongan masyarakat.¹³

Tingkah laku manusia khususnya tingkah laku ekonominya harus sesuai dengan ketentuan Allah atau sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Tingkah laku atau perilaku muslim terletak pada kerjasama, bukan menonjolkan kompetis, karena bila yang terakhir yang diutamakan akan membuahkan ketidakadilan dan ketidakjujuran, seta akan merusak tatanan moral yang amat didambakan oleh manusia yang beriman.¹⁴

Sementara itu prinsip ekonomi Islam menurut Syaefuddin menyatakan bahwa keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan atau kebebasan perseorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁵

Dalam Islam, tanah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, oleh karena itu pemilik dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebagian besar masyarakat adalah bertentangan dengan jiwa

¹³Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2006), Cet. ke-1, h. 10.

¹⁴Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*, (Riau: Suska Press, 2008), h. 6.

¹⁵AM Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), Cet. ke-2, h. 66.

Al-Qur'an. Didalam ekonomi Islam tidak seorang pun yang bisa menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan, jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan kepada orang lain untuk digarap, oleh sebab itu nantinya akan terjalin kerjasama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennyadibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya.

Dalam sistem ekonomi Islam, terkait pemanfaatan tanah ada beberapa sistem akad yang dapat dilakukan, diantaranya '*Ariyah* secara bahasa berarti "pinjaman".¹⁶ Dalam pelaksanaannya, '*Ariyah* diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.

Dalam pengertian lain *Ariyah* (pinjam-meminjam) yaitu memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.¹⁷

Akad lainnya dapat juga dengan sistem *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*. Maka dapat di pahami bahwa akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan

¹⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 37.

¹⁷Suhrawardi k Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1, h. 136.

dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola, maka disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *Muzara'ah*. Bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁸ Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah. Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Akad *Musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

Diantara sederetan aspek kerja sama dan perhubungan manusia yang digariskan dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dan kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah bagi hasil dalam bidang pertanian atau dalam istilah fiqh disebut dengan *Mukhabarah* (Bagi hasil), aspek ini dipandang penting peranannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.¹⁹ *Mukhabarah* adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang akan bercocok tanam yang modalnya dari penggarap atau yang mengelola, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi dua dan menjanjikan bila masa panen tiba dia akan memberi imbalan hasil panen.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h.117.

¹⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung:Diponegoro, 1984), h.37.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *Mukhabarah* adalah semacam perkongsian dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan pengelola untuk menjadikan lahan tersebut mendatangkan hasil dan apabila telah berhasil atau panen, maka kedua pihak mendapat bagian dari hasil tersebut sesuai dengan jumlah yang tidak ditentukan.

Tepatnya di Desa Sri Gading, masyarakatnya bekerja sebagai petani, walaupun demikian mereka tetap optimis akan memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk membuka sektor perkebunan atau ladang sayur mayur seperti tanaman sayur kangkung, daun ubi, kacang panjang dan masih banyak yang lainnya, dengan atau tanpa harus mengesampingkan profesi sebagai petani.

Namun tidak semua masyarakat memiliki tanah pertanian sebagian dari mereka berkongsi atau bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian. Dalam pengolahannya disamping dikerjakan sendiri oleh para pemilik kebun juga dilakukan dengan cara bagi hasil, yaitu menyerahkan lahan pertanian dalam keadaan kosong tanpa tanaman apapun didalam lahan tersebut, dan bibit yang akan ditanam dari pihak yang akan mengelola.

Sistem kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap disepakati diawal akad sebelum kerjasama tersebut diserahkan kepada petani penggarap. Prosedur tersebut mengenai tentang pengolahan lahan dari awal sampai bagi hasil yang diperoleh.

Adapun konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 70:30, dalam hal ini petani atau penggarap diberi hak oleh pemilik lahan

untuk mengambil hasil panen yang untuk dikonsumsi sendiri (gratis) sebelum masa panen tiba.²⁰

Dari hasil pengamatan penulis terhadap kerjasama usaha pertanian ladang sayur mayur di Desa Sri Gading, ditemukan sebagian pemilik lahan memberikan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Bagi petani yang tidak memiliki sifat amanah hal tersebut dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sendiri.²¹

Dari bentuk-bentuk sistem akad pemanfaatan lahan kosong yang terjadi di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tidak ada ketentuan dalam bagi hasil pertanian, karena pembagiannya dibagi berdasarkan area ladang yang belum dipanen, sehingga jika waktu panen tiba penggarap akan membagi dua hasil ladang kepada pemilik untuk memilih bagian mana untuk dirinya atau sebaliknya, kemudian baru hasilnya dipanen masing-masing pihak. Seperti contoh kasus berikut ini:

“Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Amir Mahmud saat penulis wawancara: “Saya mengelola tanah kosong milik orang lain. Dengan hasilnya di bagi dua yang modalnya dari pihak pengelola setelah terjadi kesepakatan maka mulailah menanam dan hasil mereka bagi dua berdasarkan area lahan, yaitu dengan membagi lahan menjadi dua bagian. Pembagian dua area lahan yang mereka lakukan tidak dalam keadaan sudah dipanen tetapi, masih diladang dan belum dipanen. Jika waktu panen sudah tiba penggarap akan membagi dua ladang dan menawarkan kepada pemilik untuk memilih bagian

²⁰ Amir Mahmud, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 24 Juni 2013.

²¹ Observasi pada Bulan Januari 2013, Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

mana untuk dirinya atau sebaliknya, pemilik memberikan kebebasan untuk penggarap untuk memilih, baru hasilnya dipanen masing-masing pihak”.²²

Berdasarkan fenomena diatas yang dilakukan masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdapat kejanggalan seperti pada bagi dua hasil pertanian karena tidak jelasnya jumlah hasil yang dibagi, bisa jadi lahan yang separuhnya tidak memiliki hasil yang baik, sehingga pihak yang mendapatkannya akan dirugikan sehingga tujuan dari saling ingin membantu kedua belah pihak tidak akan tercapai. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan judul **“SISTEM PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini maka penulis memfokuskan kajian penelitian ini tentang Sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak di tinjau menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?

²² Amir Mahmud , Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 24 Juni 2012.

2. Apa Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Tersebut?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan kosong tersebut?
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi tentang sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- b. Untuk menambah pengetahuan atau wawasan ilmu pengetahuan keislaman, khususnya tentang sistem pemanfaatan lahan kosong.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program SI pada fakultas Syariah dan ilmu hukum jurusan ekonomi islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field resech*). Metode tersebut di laksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Karena di Desa ini banyak masyarakat yang melakukan sistem pemanfaatan lahan kosong sehingga saya tertarik menelitinya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pemilik dan penggarap.
- b. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapunpopulasi didalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang melakukan sistem pemanfaatan lahan kosong yang berjumlah 30 orang.

Karena keterbatasan waktu maka penulis mengambil 50% dari populasi dengan rincian 5 orang pemilik lahan dan 10 orang penggarap. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel dimana elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut *representative* atau mewakili populasi yang ada.

4. Sumber Data

Dalam menghimpun atau mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder :

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh melalui responden di lapangan yakni pemilik lahan.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui instansi-instansi terkait, buku-buku kitab fiqh serta literatur lain yang memungkinkan berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung dan memperhatikan secara mengamati masalah yang di teliti di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang melaksanakan pemanfaatan lahan kosong.
- c. Angket, yaitu cara pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan kepada para responden, guna mendapatkan yang di butuhkan.

6. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data dikumpulkan, maka penulis dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Untuk mengelola serta menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

- a. Deduktif, yaitu penulis mengumpulkan data data yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data data yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti dari yang bersifat khusus lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang di bahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya V bab, dimana masing masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I: Dalam bab ini akan di bahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kondisi geografis dan demografis, agama dan pendidikan, sosial ekonomi dan adat istiadat.

BAB III : Membahas tentang akad dalam pemanfaatan lahan kosong meliputi, Pengertian *Akad, Syirkah, Mudharabah atau Qiradh, Al-Ariyah, Muzara'ah* dan *Mukhabarah, Musaqah*, dasar hukum *Al-Ariyah, Muzara'ah* dan *Mukhabarah, Musaqah*, rukun dan syarat *Akad, Syirkah, Mudharabah atau Qiradh, Al-Ariyah, Muzara'ah* dan *Mukhabarah, Musaqah*.

BAB IV : Membahas tentang Sistem pemanfaatan lahan kosong, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan kosong, bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang sistem pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

BAB V : Penutup, yakni yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Sri Gading merupakan suatu daerah yang terletak di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Untuk mencapai Desa Sri Gading hanya dapat ditempuh melalui jalan darat yang jaraknya dari jalan raya Pekanbaru Siak ke Desa Sri Gading hanya 4 Kilo Meter.

Tahun 1987 Desa Sri Gading terletak di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Bengkalis. Dan setelah Siak memekarkan diri menjadi sebuah Kabupaten sendiri, maka Desa Sri Gading ikut pada Kecamatan Kerinci Kanan. Dan pada tahun 2004 memisahkan diri mengikuti Kecamatan Lubuk Dalam.²³

Untuk mengetahui batas-batas daerah Sri Gading, maka Desa Sri Gading berbatasan dengan Desa-desanya sekitarnya yaitu:

Bagian sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buana

Bagian sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rawang Kao

Bagian sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Nusantara Lima

Bagian sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Empang Baru.²⁴

Desa Sri Gading dihuni oleh berbagai suku pendatang, seperti: Jawa, Batak, Melayu, Minang, Banjar, dan suku-suku kecil lainnya.

Penduduk Desa Sri Gading berjumlah 2095 jiwa. Dari 2095 jiwa tersebut 1045 kaum laki-laki dan 1050 adalah kaum perempuan. Untuk lebih

²³ Sujarwo, Kepala Desa Sri Gading, *wawancara*, 26 november 2012.

²⁴ Data Kantor Kepala Desa Sri Gading.

jelasan tentang keadaan penduduk Desa Sri Gading dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 1
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bambu Kuning	315	310	625
2	Sido Mulyo	260	254	514
3	Wonosari	470	486	956
	Jumlah	1045	1050	2095

Sumber Data: Kantor Desa Sri Gading, November 2012

Dari tabel I diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih beberapa saja. Untuk Dusun Bambu Kuning jumlah penduduk laki-lakinya 315 dan perempuannya 310, Dusun Sido Mulyo penduduk laki-lakinya berjumlah 260 dan perempuannya 254. Sedangkan untuk Dusun Wonosari adalah laki-laki sebanyak 470 dan perempuan sebanyak 486.

Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

TABEL II. 2
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	Umur 0 – 4 Tahun	214	10.2 %
2	Umur 6 – 12 Tahun	223	10.7 %
3	Umur 13 – 16 Tahun	227	10.9 %
4	Umur 17 – 19 Tahun	214	10.2 %
5	Umur 20 – 25 Tahun	281	13.5 %
6	Umur 26 – 39 Tahun	354	16.8 %
7	Umur 40 – 55 Tahun	400	19.0 %
8	Umur 56 Keatas	182	8.7 %
	Jumlah	2095	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sri Gading, November 2012

Dari tabel II diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Sri Gading yang berumur dibawah 4 tahun sebanyak 214 jiwa, yang berumur 6 sampai 12 tahun berjumlah 223, yang berumur 13 sampai 16 tahun berjumlah 227, yang berumur 17 sampai 19 tahun berjumlah 214 jiwa, yang berumur 20 sampai 25 tahun berjumlah 281 jiwa, yang berumur 26 sampai 39 tahun berjumlah 354 jiwa, yang berumur 40 sampai 55 tahun berjumlah 400 jiwa dan yang berumur diatas 56 tahun berjumlah 182 jiwa. Dari jumlah keseluruhan yang paling banyak adalah yang berumur antara 40-55 tahun.

B. Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Sri Gading mayoritas beragama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi. Meskipun masyarakat Desa Sri Gading beragama Islam, bukanlah merupakan suatu jaminan bahwa konsepsi Islam atau Syari'at Islam telah terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk Desa Sri Gading umumnya menganut agama Islam dan sedikit penduduk yang menganut agama lain. Agama lain yang dimaksud hanya agama kristen khatolik dan kristen protestan, sedangkan hindu dan budha tidak ada seperti terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 3
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT AGAMA

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2045	98 %
2	Kristen	43	1.5 %
3	Kristen Khatolik	7	0.5 %
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	2095	2095

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sri Gading

Dari tabel III diatas dapat dilihat betapa agama Islam hampir 100 % dianut oleh warga Desa Sri Gading. Sebanyak 98 % penduduk menganut agama Islam dan 1,5 % menganut agama Kristen dan 0,5 % menganut agama Kristen Khatolik.

Jika dilihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama umat Islam di Desa Sri Gading dapat dikatakan cukup memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya (2095 jiwa) yang 98 % beragama Islam.

Selanjutnya penulis sajikan sarana ibadah yang ada di Desa Sri Gading. Adapun sarana ibadah yang ada terlihat pada tabel dibawah ini:

TABEL II. 4
JUMLAH SARANA IBADAH

No	Nama Dusun	Masjid	Mushala	Gereja
1	Bambu Kuning	1	4	-
2	Sidomulyo	2	5	-
3	Wonosari	2	5	1
	Jumlah	5	14	1

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sri Gading

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa di Desa Sri Gading terdapat 5 (lima) buah masjid 14 (empat belas) buah mushala dan 1 (satu) buah gereja.

Dari kelima buah masjid tersebut masing-masing terletak di 3 Dusun yaitu Dusun Bambu Kuning, Dusun Sidomulyo, dan Dusun Wonosari. Sedangkan untuk mushala 4 (empat) buah berada di Dusun Bambu Kuning, 5 (lima) buah berada di Dusun Sidomulyo dan 5 (lima) buah berada di Dusun Wonosari. Sedangkan untuk gereja berada di Dusun Wonosari. Adapun jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di Desa Sri Gading berjumlah 20 buah.

Desa Sri Gading berjarak 49 Kilometer dari ibu kota Kabupaten. Namun perkembangan dalam bidang pendidikan tergolong pesat, walaupun tidak sepesat yang ada di kota, hal ini terlihat pada tabel berikut:

TABEL II. 5
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	PAUD	1
3	SD	1
4	SLTP	-
5	SMA	-
6	SMK	-
7	MDA	1
	Jumlah	4

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sri Gading

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan belum terpenuhi untuk setiap tingkatan sekolah. Misalnya di Desa Sri Gading hanya terdapat 4 (empat) sarana pendidikan yaitu tingkat TK, PAUD, SD dan MDA sedangkan untuk tingkat SLTP, SMA, dan SMK belum ada. Belum adanya sarana pendidikan tingkat SLTP, SMA, SMK dikarenakan letak Desa Sri Gading dengan kecamatan Lubuk Dalam hanya 5 kilometer dan di kecamatan

telah ada sarana pendidikan tingkat SLTP, SMA, dan SMK masing-masing ada 3 (tiga).

Kemudian kalau diperhatikan tingkat pendidikan penduduk secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL II. 6
KLASIFIKASI TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	15	0.7 %
2	SMA	128	6.1 %
3	SLTP	420	20.1 %
4	SD	859	41.1 %
5	Belum Sekolah	214	11 %
6	Tidak Tamat	459	21 %
	Jumlah	2095	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sri Gading

Dari tabel VI terdapat 0,7% penduduk berpendidikan sarjana, berpendidikan SMA sebanyak 6,1%, berpendidikan SLTP sebanyak 20,1%, berpendidikan SD sebanyak 41,1%, belum bersekolah 11% dan yang tidak tamat SD sebanyak 21%. Dengan demikian telah jelas bahwa mayoritas penduduk Desa Sri Gading berlatarbelakang pendidikan SD.

C. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Masyarakat Desa Sri Gading sebagian besar mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian, yaitu menanam tanaman sayur-sayuran seperti kacang panjang, tomat, timun, sawi, cabai, kacang tanah. Sedangkan untuk tanaman perkebunan yaitu, kelapa sawit dan karet. Untuk yang menjadi pegawai negeri semua adalah sebagai guru. Yang menjadi pedagang kebanyakan membuka kedai kecil-kecilan, menjual sayur-sayuran yang dibeli

dari petani langsung kemudian dijual kepasar terdekat. Untuk swasta yaitu ada yang membuat batu bara, membuat kerajinan tangan dan mendirikan kilang kayu. Yang menjadi buruh kebanyakan adalah pekerja di lahan perkebunan yang dimiliki oleh warga dan banyak juga yang bekerja menjadi buruh di perusahaan yang ada di Siak. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL II. 7
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Bertani	1209	58%
2	Pegawai Swasta	23	1.1%
3	Pegawai Negeri	7	0.3%
4	Pedagang	46	2.2%
5	Buruh	425	20%
6	Belum Bekerja	354	16.9%
7	Tidak Bekerja	12	0.6%
8	Lain-Lain	19	0.9%
	Jumlah	2095	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sri Gading

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Sri Gading yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani sebanyak 1209 jiwa atau 58%, untuk pegawai swasta sebanyak 23 jiwa atau 1,1%, sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 7 jiwa atau 0,3%, sebagai pedagang sebanyak 46 jiwa atau 2,2%, sebagai buruh sebanyak 425 jiwa atau 20%, yang belum bekerja sebanyak 354 jiwa atau 16,9% yang tidak bekerja sebanyak 12 jiwa atau 0,6% dan lain-lain sebanyak 19 jiwa atau 0,9%. Dari tabel diatas jelas bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sri Gading adalah sebagai petani. Dalam masyarakat Desa Sri Gading, adat masih berperan ditengah-masyarakat. Misalnya dalam acara kelahiran, pemberian nama, aqiqah, tengah

sunat Rasul, perkawinan, kematian, hari-hari besar agama dan sebagainya. Terutama dalam pelaksanaan acara tradisi upacara pernikahan walaupun mereka hidup di daerah Siak yang identik dengan melayu masyarakat Desa Sri Gading yang berasal dari suku Jawa tetap menggunakan adat istiadat mereka.

Dalam upacara pernikahan, masyarakat Sri Gading tidak menggunakan acara tunangan melainkan apabila ada masyarakat Sri Gading yang akan menikah pihak laki-laki hanya perlu melamar kemudian diterima atau tidak lamarannya dan disepakati hari pernikahannya. Pelaksanaan pernikahan biasanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Untuk acara resepsi pernikahan, dilakukan di rumah mempelai perempuan, dan apabila mempelai laki-laki ingin mengadakan juga tidak apa-apa.

Untuk acara hari-hari besar keagamaan, biasanya masyarakat Sri Gading menyambutnya dengan mengadakan kenduri di mushala-mushala yang ada. Semua kegiatan adat yang dilaksanakan selalu diikuti dengan mengadakan syukuran atau kenduri.

Dengan berperannya adat di masyarakat, maka setiap penduduk atau warga yang datang menetap di Desa Sri Gading, mereka harus memakai tradisi yang berlaku. Misalnya apabila ada masyarakat baru, mereka harus mengikuti aturan yang ada seperti melapor pada ketua RT setempat atau ada kepala Dusun setempat, apabila bertamu ke rumah perempuan bagi laki-laki tidak boleh lewat dari jam 9 malam, apabila bertemu orang yang lebih tua harus menyapanya.



29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

BAB III

TINJAUAN TEORI BENTUK-BENTUK AKADPEMANFAATAN LAHAN KOSONGDALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Akad

1. Pengertian

Menurut segi *etimologi* akad antara lain berarti: “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.²⁵

Menurut *terminologi* ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”

Secara khusus, pengertian akad yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau

²⁵Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

2. Rukun dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*aqid*), contoh: penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul²⁶

1) Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi'* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

²⁶*Ibid.* h. 45.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli)
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulamasah*
- e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila *rahnd* dianggap sebagai imbalan *amanah*
- f. sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁷

B. Syirkah

1. Pengertian

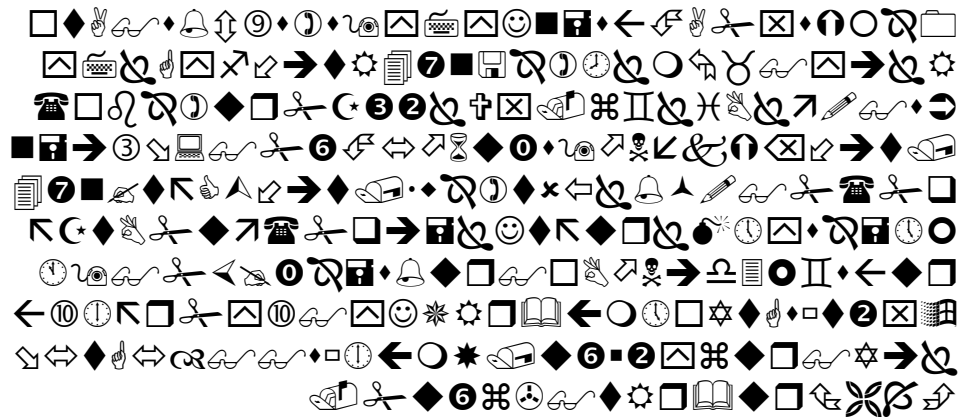
Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran. Menurut istilah yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.²⁸ Jenis *syirkah* ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain didalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 49-50 .

²⁸ *Ibid*, h. 125-127.

bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya.²⁹ Firman Allah SWT surat

Shaad ayat 24:



Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

2. Rukun dan Syarat

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama hanafiah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul, sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut hanafiah dibagi kepada empat bagian yaitu:

- Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat

²⁹Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 565.

diterima sebagai perwakilan, (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: (a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah, (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan: (a) modal (pokok harta) dalam *syirkahmufawadhah* harus sama, (b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, (c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah* inan sama dengan syarat-syarat *syirkah* mufawadhah.³⁰

Menurut Malikiah bahwa syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baliqh dan pintar (*rusyd*), Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah* inan, sedangkan *syirkah* yang lainnya adalah batal.

C. Mudharabah atau Qiradh

1. Pengertian

³⁰ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 127-128.

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yang biasa pula disebut *Qiradh* yang berarti *al-qath'* (potongan). Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.³¹

Menurut istilah syara, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³²

2. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukunnya ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab A-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al Fikr, 1986), h. 34.

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 11.

Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri, maka syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk, uang tunai, maka bila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut adalah batal.
- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang berada dibawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, umpamanya setengah , sepertiga, atau seperempat.³³

D. Ariyah (Pinjam-meminjam)

1. Pengertian

Menurut etimologi, *Ariyah* berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *Ariyah* berarti saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.³⁴

³³ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 139-140.

³⁴ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 139.

Menurut terminologi syara' ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Syarkhasyhi dan ulama Malikiyah:

“Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”

b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah:

“Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”

Pengertian pertama memberikan pengertian makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.

2. Dasar Hukum

Ariyah dianjurkan dalam Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

3. Rukun dan Syarat Ariyah

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun Ariyah ada empat, yaitu:

1. *Mu'ir* (peminjam)
2. *Musta'ir* (yang meminjamkan)

3. *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
4. *Shighat*, yaitu sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa syarat Ariyah ada tiga , yaitu:

- a. *Mu'ir* berakal sehat

Dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang.

- b. Pemegangan barang oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam.

- c. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.³⁵

E. Muzara'ah

1. Pengertian

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-badzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah makna hakiki.³⁶ *Muzara'ah* berarti menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan

³⁵ *Ibid*, h. 141-142.

³⁶ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 153.

membayar sebagian dari hasil tanah itu.³⁷ Menurut Hanafiyah, rukun *Muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, maka secara rinci, jumlah rukun-rukun *Muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu: 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanam.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Syarat yang bertalian dengan '*aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagiandari masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenyaketika akad).
 - b) hasil adalah milik bersama.
 - c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a) tanah tersebut dapat ditanami.
 - b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
5. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:

³⁷*Ibid*, h. 155-156.

- a) waktunya telah ditentukan.
 - b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
6. Yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.³⁸

F. Mukhabarah

1. Pengertian

Sebagian ulama berpendapat bahwa rukun *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* memiliki arti yang sama namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Mukhabarah* dan pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Mukhabarah* sering kali diidentikkan dengan *Muzara'ah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

Mukhabarah : Benih dari penggarap

Muzara'ah : Benih dari pemilik lahan.³⁹

³⁸*Ibid*, h. 158-159.

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 99.

Al San'ani mempunyai pendapat yang sama dengan Afzalur Rahman mengenai *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan mendapatkan bagian dari penggarap dengan ketentuan benih/bibit dari pemilik kebun/lahan, dan apabila bibitnya dari penggarap maka disebut *Mukhabarah*.⁴⁰

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip dari bukunya Nasroen Haroen mendefinisikan *Mukhabarah* "pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penggarap", sehingga dalam *Mukhabarah* bibit yang ditanam disediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *Muzara'ah* bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah.⁴¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam pengelolaan tanah yang bibitnya disediakan oleh pemilik tanah/lahan dan *Mukhabarah* adalah si penggarap hanya bertugas untuk memelihara, menjaga dan menyirami lahan pertanian saja.

Walaupun demikian, ada bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih:

Bentuk-bentuk bagi hasil yang terlarang adalah:⁴²

1. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan.

⁴⁰ Al San'ani, Subul Al-Salam, (Bandung: Dahlan), h. 77.

⁴¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2000), h. 276.

⁴² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul asli, *Economic Doctrines of Islam*, oleh Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 213-215.

2. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan.
3. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam dilahan atau dikebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan dari hasil pengeluaran tanah.

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah:⁴³

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.
4. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani sehingga menjadi objek *Muzara'ah* adalah jasa petani.
5. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

⁴³ Nasroen Haroen, *Op.cit.*, h. 279.

Rukun-rukunnya adalah akad, yaitu Ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu: 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal, 4) alat-alat untuk menanam.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Syarat yang bertalian dengan '*aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) bagian dari masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad).
 - b) hasil adalah milik bersama.
 - c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - c) tanah tersebut dapat ditanami.
 - d) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
5. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a) waktunya telah ditentukan.

- b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
- c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.⁴⁴

Atas dasar keterangan diatas maka kerjasama dengan sistem ini diakui keberadaannya dalam hukum Islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.

2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dalil pendapat yang membolehkan akad *Mukhabarah* antara lain:

1. Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara Syar'i karena faktor ketidakjelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syari'at tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.
2. Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang yahudi khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifahan Umar RA, saat kemudian Umar RA mengusir mereka keluar dari khaibar. Dan itu semua dilakukan sepengetahuan para sahabat.⁴⁵

⁴⁴ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 159.

⁴⁵ Abdullah bin Abdurahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) h. 53.

Adapun hadis-hadis yang menunjukkan diperbolehkannya akad

Mukhabarah antara lain dari hadis Bukhari:

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِمَدِينَةِ أَهْلِ بَيْتِهِمْ حَجْرَةٌ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَيْهَا لَثْوًا أَوْ رُبْعًا أَوْ عُلْيَا
سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمَ وَمُعْرُوهَ وَالْأَبْيَكِرَ وَالْعُمَرَ وَالْعَلِيَّ وَابْنَ
يَرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ لَاحِقٍ، كُنْتُ أَشَارُ كَعْبُ الدَّرَّحِيِّ بِدَفْيِ الزَّرْعِ، وَعَامِلُ عُمَرَ النَّاسِ عَلَى
إِنْجَاءِ عُمَرَ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِ الشَّطْرِ وَانْجَاءِ وَوَالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا (رواه البخاري)

Artinya: “*Qais bin Muslim* meriwayatkan dari *Abu Ja’far*, ia berkata. “tidak ada seorang pun penduduk *Madinah* yang mendiami rumah hijrah, terkecuali mereka menanami sepertiga dan seperempat lahannya. *Ali*, *Sa’ad bin Malik*, *Ibnu Mas’ud*, *Umar bin Abdul Aziz*, *Al-Qasim*, *Urwah*, keluarga *Abu Bakar*, keluarga *Umar*, keluarga *Ali*, dan keluarga *Sirin* menanami lahannya, *Abdurahman bin Yazid* dalam penanamannya, ia juga mengatakan, “*Umar* juga memperkerjakan orang-orang dengan ketentuan, bila bibitnya dari *Umar* maka ia memperoleh separuh, dan bila bibitnya dari mereka maka bagimereka sekian.”⁴⁶

Maksud dari sabda Rasulullah SAW “seseorang yang memberikan tanah pada saudaranya itu lebih baik baginya dari pada ia memungut hasil panen yang tertentu sebagai imbalan atas tanahnya tersebut” bahwasannya ketika salah satu pihak melakukan *Mukhabarah* menentukan keuntungan diambil dari satu tanah tertentu dari seluruh tanah yang diolah. Maka cara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seperti yang tertulis dalam hadis:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَهُاءَ لِمَدِينَةِ حَقْلًا وَكُنَّا حَدَثًا بِكَرْبَارِضِهِمْ قَوْلُهُمْ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِهَؤُلَاءِ
لَكَ. فَمَا أَخْرَجْتَهُمْ لَمْ نَخْرِجْهُمْ هُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Rafi’ bin Khudaij*, ia menuturkan, ”kami termasuk golongan *Madinah* yang paling banyak memiliki kebun. Dahulu kami biasa memperkerjakan orang untuk menggarap tanah

⁴⁶Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz. 2, (Beirut: Dar Ibnu Katsir. 7987), h. 819.

dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya bagian yang sebelah sini yang menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak, kami tidak larang.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).⁴⁷

Hadis diatas ini menerangkan tidak diperbolehkannya *Mukhabarah* seperti itu, karena bisa jadi tanah yang dipilih pihak pemilik hasilnya lebih banyak dan yang lainnya sedikit atau hasil panennya buruk, hal ini tentu menguntungkan sebelah pihak dan pihak yang lainnya akan dirugikan.

Hadis diatas juga menerangkan larangan dimasukkannya syarat dalam akad yang merusak akad itu sendiri. Contohnya seperti syarat pembayaran sewa diambil dari hasil panen tertentu, atau dari hasil panen dari lahan-lahan tertentu, seperti yang berada di lahan dekat sungai dan sejenisnya. Akad seperti ini merupakan akad *Muzara'ah/Mukhabarah* yang tidak sah (*fasidah*) karena adanya unsur ketidakjelasan dan resiko (diluar perhitungan).

Jadi segala bentuk akad yang mengandung terbukanya penipuan, ketidakjelasan dan resiko (diluar perhitungan yang merugikan salah satu pihak) adalah diharamkan dan batal. Karena itu merupakan bagian dari perjudian atau pertaruhan. Akad demikian adalah bentuk dari kezaliman bagi salah satu pihak yang hanya menyebabkan permusuhan.⁴⁸ Syari'at Islam datang dengan mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan diantara

⁴⁷ *Ibid.* h. 821.

⁴⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *op.cit.*, h. 48-49.

manusia. Sebagaimana juga ia bertujuan menciptakan rasa saling cinta dan sayang yang tulus diantara sesama. Seperti hadis yang tertulis dibawah ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يُزْرَعُ عِنْدَهُمَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِنْكَ أَنْتَ لَهَا رُضْفٌ لِيَزْرَعَهَا وَلِيَمَحَّهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ) (رواه البخاري)

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah RA berkata, mereka bercocok tanam dengan Muzaraah dengan pembagian 1/3, 1/4, dan setengah, maka Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa (diantara kalian orang kaya) memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah menyewakannya”.⁴⁹

G. *Musaqah*

1. Pengertian

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurusnya sebagai imbalan.

Menurut istilah, *al-musaqah* didefinisikan sebagai akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.⁵⁰ *Musaqah* yaitu menetapkan kepada seorang pekerja kepada pepohonan untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memperhatikan kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah itu boleh dibagikan bersama. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan

⁴⁹ Muhammad Bin Ismail, Shahih Bukhari, Juz. 2, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 7987), h. 824.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 147-148.

baginya suatu akad perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para tabi'in sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi.⁵¹

2. Rukun dan Syarat

Rukun-rukun Musaqah menurut ulama Safi'iyah ada lima yaitu:

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*), disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat buah atau mengawinkannya.

⁵¹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), h. 688.

e. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau ukuran yang lainnya.⁵²

⁵² Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 148-149.

BAB IV

SISTEM PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI DESA SRI GADING

KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK DI TINJAU

MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.⁵³

Sehubungan dengan ini, masyarakat Desa Sri Gading pun telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian, dalam hal ini masyarakat Desa Sri Gading mengembangkan usaha/membudidayakan lahan pertanian kosong yang tidak dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian mereka.

Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat yang mempunyai lahan yang lebih, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan ada pula yang mempunyai lahan kosong akan tetapi tidak mempunyai

⁵³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensido, 2012), Cet. 57, h. 278.

kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya, untuk menghindari terjadinya ketelantaran kebun dan lahan, maka mereka melakukan akad kerja sama untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut.

Dalam mengelola lahan pertanian antar satu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda, karena dalam pengelolaannya disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri, begitu juga halnya dengan pengolahan dan akad yang terdapat di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Untuk pembahasan dalam bagian ini penulis akan menyampaikan sistem pemanfaatan lahan kosong masyarakat Desa Sri Gading dengan maksud untuk mengetahui lebih jelas bagaimana masyarakat menggunakan sistem pemanfaatan lahan pertanian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Amir Mahmud dimana masyarakat Desa Sri Gading yang melakukan pemanfaatan lahan kosong tersebut sudah cukup lama karena disamping untuk tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ada juga sebagian yang tidak terlalu lama dikarenakan terkendala oleh waktu dan tenaga kerja yang kurang yang dipengaruhi oleh faktor usia padahal ingin sekali melakukan pemanfaatan lahan kosong tersebut.⁵⁴ Yang menjadi alasan terlaksananya pemanfaatan lahan kosong tersebut dikarenakan ketidakmampuan masyarakat Desa Sri Gading untuk menggarapnya sendiri dikarenakan faktor usia dan ada pula yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mempunyai waktu untuk

⁵⁴ Amir Mahmud, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, 6 Januari 2013.

menggarapnya maka si pemilik lahan mengatakan dari pada lahan mereka kosong dan tidak ada manfaatnya atau tidak ada yang mengerjakannya maka lebih baik mereka melakukan akad kerjasama untuk memanfaatkan lahan tersebut.⁵⁵

Pelaksanaan sistem pemanfaatan lahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak berbentuk pemanfaatan lahan kosong. Dalam melakukan pemanfaatan ini, tentunya ada hal yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan pemanfaatan lahan kosong yaitu hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban ini merupakan tanggung jawab yang tidak terlepas dari pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan lahan kosong.

Seperti hasil wawancara saya dengan salah satu pemilik lahan bapak Ahmad Sopandi mengatakan: kewajiban saya dalam pemanfaatan lahan ini yaitu menyerahkan lahan untuk digarap dengan sebaik mungkin, dan jika waktu panen tiba saya mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut sesuai kesepakatan.⁵⁶

Begitu juga ungkapan dari salah seorang penggarap lahan (amir mahmud), beliau mengatakan: kewajiban saya atas tanah yang saya pinjam adalahenggarapnya dengan baik agar menghasilkan sedangkan hak saya atas tanah ini adalah bisa memanfaatkannya, seandainya terjadi bencana banjir atau

⁵⁵Rusli, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, 6 Januari 2013.

⁵⁶Ahmad Sopandi, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

kebakaran, maka petani tidak menanggung kerugian selama bencana itu terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian petani penggarap.⁵⁷

Dalam pemanfaatan lahan ini penggarap juga mengalami kendala-kendala yang dialami seperti kurangnya lahan dikarenakan terbatas lahan yang dikerjakan, selain itu kurangnya tenaga kerja karena ketidakmampuan, disebabkan faktor usia dan ada yang mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki waktu untuk mengerjakannya karena adanya kesibukan lain, kemudian sering terjadinya perselisihan antara penggarap dan pemilik lahan seperti pada pembagian hasil pertanian.

Berikut adalah bentuk-bentuk sistem pemanfaatan lahan kosong yang dipakai oleh masyarakat Desa Sri Gading;

1. Sistem Sewa

Sistem sewa adalah sistem yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani penggarap dalam penyewaan kebun secara tunai. Pemilik kebun menyewakan kepada petani penggarap, penggarap memberikan sejumlah uang sewa secara tunai yang telah ditentukan oleh pemilik kebun sebagai pengganti dari hasil kebunnya. Dengan demikian petani penyewa telah mempunyai hak untuk menggarap kebun tersebut.

Pada sistem ini semua peralatan, pupuk dan obat-obatan ditanggung oleh petani penyewa begitu juga dari hasil pertaniannya semua menjadi milik petani. Pemilik kebun dalam hal ini tidak mendapat apa-apa kecuali uang dari hasil sewa kebun tersebut.

⁵⁷ Amir Mahmud, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

Dalam sistem ini pemilik kebun menentukan jumlah uangnya yang harus dibayarkan oleh petani penyewa dan menentukan lamanya penyewaan. Ketentuan jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan berapa petak tanah yang disewanya dan tergantung luas tanah yang disewanya. Rentang waktu biasanya ditetapkan persemester atau per-6 bulan dan ada juga pertahunnya, dan biasanya pekerja memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- sebagai pengganti dari tanah yang disewanya. Apabila masa sewa telah berakhir maka petani penyewa harus mengembalikan kebun tersebut kepada pemilik kebun dan juga jika ia berkeinginan untuk tetap menyewanya kembali maka harus melakukan akad sewa kembali.⁵⁸

Akad sewa ini terjadi biasanya pemilik kebun bertempat tinggal di daerah lain dan ada juga karena tidak sempat mengurusnya dengan alasan dia mempunyai pekerjaan lain seperti Guru dan Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Suwiryo, dia menyewakan lahan kosongnya kepada Bapak Aripin untuk bisa ia garap.

2. Sistem Bagi Dua (Paroan)

Sistem bagi dua ini adalah dimana orang yang mempunyai lahan kosong menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk digarap. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka.

Sistem ini biasanya semua peralatan ditanggung oleh petani penggarap sedangkan yang berkaitan dengan keawetan kebun seperti pupuk,

⁵⁸ Sujarwo, Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 8 Januari 2013.

obat-obatan ditanggung oleh pemilik kebun. sehingga dalam bagi hasil pertanian mereka bagi dua saja.

Tetapi terdapat kejanggalan pada bagi dua lahan pertanian karena tidak jelasnya jumlah hasil yang dibagi, bisa jadi lahan yang separuhnya tidak memiliki hasil yang baik, sehingga pihak yang mendapatkannya akan dirugikan.⁵⁹

Namun jika selama penggarapan berjalan, tiba-tiba petani penggarap sakit atau ditimpa musibah, maka biasanya yang punya kebun menyuruh kerabat penggarap untuk menggantikannya selama dia sakit dan hasilnya pun tetap dibagi separoh untuk yang punya kebun dan separohnya lagi tergantung pada dua orang penggarap tersebut. dan jika terjadi bencana banjir misalnya atau kebakaran, maka kerugian ditanggung bersama tetapi jika disebabkan oleh kelalaian penggarap maka petani penggarap yang menanggungnya.⁶⁰

3. Sistem Bagi Tiga

Sistem bagi tiga ini terjadi dimana orang yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap. Adapun pembagiannya dibagi tiga yang dua bagiannya untuk yang punya kebun, misalnya dalam sepekan menghasilkan 120 kg sayuran ataupun kacang-kacangan, dibagi tiga menjadi 40 kg, yang mana 40 kg untuk yang punya kebun dan sisanya untuk petani penggarap.⁶¹

⁵⁹ Darmadi, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 24 Juni 2012.

⁶⁰ Observasi, Tanggal 6 Januari 2013, Di Desa Sri Gading.

⁶¹ Samud, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

Seperti halnya sistem tolong-menolong, sistem bagi tiga ini pun didasari rasa solidaritas sesama manusia dan saling tolong-menolong akan sesama saudara. Sistem ini juga terjadi biasanya karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lokasi.

4. Sistem Tolong Menolong/pinjam gratis

Pada sistem ini pemilik lahan menyerahkan lahan kosongnya kepada petani penggarap, namun tidak ditentukan bagi hasilnya. Petani penggarap boleh menyerahkan hasil kebun itu dalam sepekan berapa saja, karena dalam sistem ini sifatnya hanya tolong-menolong dan membantu sesama manusia.

Sistem ini terjadi biasanya pemilik lahan merasa kasihan melihat kondisi ekonomi petani penggarap sangat lemah/rendah sehingga pemilik menyerahkan lahannya untuk digarap dan juga biasanya terjadi karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lokasi kebunnya atau didaerah lainnya seperti kerinci, dan tidak jarang diantara mereka alasannya karena tidak mempunyai kesempatan untuk menggarapnya karena mempunyai pekerjaan lain seperti Guru, Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya.

Misalnya Bapak Ahmad Sopandi menyerahkan lahannya kepada Bapak Mihad untuk mengelola dan merawat agar jangan sampai lahan tersebut terlantar, karena pemilik kebun tidak sempat mengurusnya dan tidak bertempat tinggal di Desa Sri Gading.⁶²

⁶² Mihad, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 8 Januari 2013.

Perlu dijelaskan bahwa pada sistem tolong-menolong/pinjam gratis ini agak berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, pada sistem ini dilatarbelakangi semata-mata hanya untuk menolong petani penggarap, tidak seperti kedua sistem sebelumnya yang merupakan suatu tujuan meningkatkan taraf kehidupan atas hasil yang didapat.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil penelitian dengan angket yang disebarakan dibawah ini.

TABEL IV.1
Jawaban Penggarap Lahan:
Masa Pemanfaatan Lahan Kosong

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	1-5 Bulan	-	-
2	5-12 Bulan	-	-
3	1-5 Tahun	10	100
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keseluruhan responden 10 orang atau 100% penggarap mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pemanfaatan lahan pertanian selama 1-5 Tahun. Dari responden tersebut adalah Bapak Amir Mahmud, Jegu, Yumi, Mihad, Jumiati, Darmadi, Samud, Ahmad Sopandi, Natori, dan Bapak Aripin mereka rata-rata berumur antara 35-65 tahun berpendidikan rata-rata SD-SLTP dan berasal darisatu desa yang sama dan semuanya beragama Islam, penduduk tersebut mengatakan pemanfaatan lahan kosong ini telah terjadi cukup lama.⁶³

⁶³Saefuddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 10 Desember 2012.

Dibawah ini kita lihat apakah penggarap melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik sebelum melakukan pemanfaatan lahan.

TABELIV.2
Jawaban Penggarap Lahan: Tentang Izin Kepada Pemilik Lahan

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	10	100
2	Tidak	-	-
3	Langsung pakai	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keseluruhan responden 10 orang atau 100% penggarap lahan mengatakan bahwa mereka izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan sebelum melakukan pemanfaatan lahan kosong tersebut. Dari keseluruhan responden tersebut diambil sebagian yaitu Bapak Amir Mahmud, Aripin, dan Bapak Rusli yang berusia antara 35-65 tahun yang berasal dari desa yang sama dan keseluruhan beragama Islam pendidikan terakhirnya rata-rata SD-SLTP.

Pada pemanfaatan lahan kosong ini dalam bentuk apa saja perjanjian yang dilakukan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABELIV.3
Jawaban Penggarap Lahan:
Tentang Bentuk Perjanjian Pemanfaatan Lahan Kosong

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Tertulis	-	-
2	Tidak Tertulis (saling percaya)	7	70
3	Tidak ada	3	30
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tidak ada yang mengatakan perjanjian secara tertulis, 7 orang atau 70% mengatakan tidak tertulis (saling percaya), dari responden yang bernama Bapak Amir Mahmud, Jego, Darmadi, Ahmad Sopandi, Samud, Jumiaty, Mihad dan 3 orang atau 30% mengatakan tidak ada, dari responden bernama Bapak Rusli, Aripin, dan Bapak Natori, mereka berusia antara 35-65 tahun beragama Islam dan dari desa yang sama kecuali bapak Samud yang berasal dari kerinci dikarenakan pindah dan mempunyai lahan di Desa Sri Gading. Hal ini terjadi karena pemanfaatan lahan kosong ini terjadi pada masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang sudah saling mengenal lama dan menetap lama.⁶⁴

Dengan melakukan pemanfaatan lahan kosong ini Masyarakat Desa Sri Gading merasakan dampaknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

TABELIV.4
Jawaban Penggarap Lahan:
Tentang Dampak Pemanfaatan Lahan Kosong

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sedikit membantu	3	30
2	Sangat membantu	7	70
3	Tidak membantu	-	-
		10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 3 orang atau 30% mengatakan sedikit membantu, dari responden yang bernama Bapak Jego,

⁶⁴Amir Mahmud, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

Yumi, dan Bapak Darmadi, 7 orang atau 70% mengatakan sangat membantu kehidupan keluarganya dari responden yang bernama Bapak Amir Mahmud, Natori, Rusli, Ahmad Sopandi, Samud, Jumiati, Mihad dan tidak ada yang mengatakan tidak membantu keluarganya. Mereka berusia antara 35-65 tahun bertempat tinggal satu desa kecuali Bapak Samud yang bertempat tinggal di Kerinci dan keseluruhan beragama Islam pendidikan terakhirnya SD-SLTP. Dalam pemanfaatan lahan ini Masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dapat menjual hasil panennya sehingga dapat mencukupi kebutuhan lain yang akan dibeli.⁶⁵

Sistem yang digunakan dalam pemanfaatan lahan kosong ini ada yang dengan sewa, pinjam gratis dan bagi hasil, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel dibawah ini.

TABELIV.5
Jawaban Penggarap Lahan:
Sistem Yang Digunakan Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sewa	2	20
2	Bagi hasil	6	60
3	Pinjam/gratis	2	20
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 2 orang atau 20% yang mengatakan menyewa lahan, yang bernama Bapak Suwiryo dan Aripin 6 orang atau 60% mengatakan bagi hasil, dari responden yang bernama Bapak Amir, Darmadi, Jego, Samud, Jumiati, Yumi dan 2 orang atau 20% mengatakan pinjam pakai/gratis yang bernama Bapak Ahmad Sopandi dan

⁶⁵*Ibid.*

Bapak Mihad. Karena si pemilik lahan mengatakan bahwa dari pada lahan mereka kosong dan tidak ada manfaatnya atau tidak ada yang mengerjakannya, maka lebih baik digarap oleh orang lain dan hasilnya dibagi dua, bagi tiga atau pinjam pakai/gratis.⁶⁶

Pembagian hasil yang dilakukan Masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak kadang disebutkan kadang juga tidak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABELIV.6
Jawaban Penggarap Lahan:
Tentang Kejelasan Pembagian Hasil Ketika Akad

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	7	70
2	Tidak	-	-
3	Kadang-kadang	3	30
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 7 orang atau 70% mengatakan ya, dari responden yang bernama Bapak Amir, Jego, Darmadi, Yumi, Mihad, Jumiaty, Natori, tidak ada yang mengatakan tidak disebutkan ketika akad, 3 orang atau 30% mengatakan kadang-kadang ketika akad pada responden yang bernama Bapak Samud, Rusli, Ahmad Sopandi, mereka berusia sekitar 35-65 tahun bertempat tinggal di desa yang sama dan mempunyai pendidikan terakhir rata-rata SD-SLTP keseluruhan responden beragama Islam.

Dapat dilihat bahwa penggarap maupun pemilik lahan pernah mengeluh saat hasil panennya tidak sama jumlah hasil panennya dan pada

⁶⁶Darmadi, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

observasi yang penulis lakukan, salah satu pemilik lahan mengeluh karena hasil panennya tidak sama jumlahnya dengan penggarap, karena pembagian hasil panen dibagi berdasarkan bagi dua lahan karena lahan yang didapatnya memiliki hasil yang tidak baik.⁶⁷

Menurut Masyarakat Desa Sri Gading yang melakukan pemanfaatan lahan kosong mereka sama-sama merasa diuntungkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

TABEL IV.7
Jawaban Penggarap Lahan: Yang Diuntungkan
Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pemilik lahan	2	20
2	Penggarap lahan	2	20
3	Kedua belah pihak	6	60
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 orang atau 20% mengatakan pemilik lahan dari responden yang bernama Bapak Rusli dan Bapak Ahmad Sopandi 2 orang atau 20% mengatakan penggarap lahan dari responden yang bernama Bapak Amir Mahmud dan Bapak Jegu dan 6 orang atau 60% mengatakan kedua belah pihak dari responden yang bernama Bapak Samud, Natori, Saefuddin, Yumi, Jumiati, Mihad. Mereka berusia sekitar 35-65 tahun bertempat tinggal satu desa, keseluruhan responden beragama Islam dan pendidikan terakhirnya hanya SD-SLTP.

Dari data diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak yang mengatakan mereka sama-sama diuntungkan, ini karena mereka

⁶⁷Observasi, Tanggal 6 Januari 2013, Di Desa Sri Gading.

berpendapat bahwa si pemilik lahan mengatakan dari pada lahan mereka kosong dan tidak dimanfaatkan dan tidak menghasilkan apa-apa, maka lebih baik digarap oleh orang lain.⁶⁸ Sedangkan dari penggarap lahan, karena kebanyakan mereka hanya mempunyai sedikit lahan untuk bercocok tanam bahkan ada yang tidak memiliki lahan lebih, maka mereka melakukan pemanfaatan lahan kosong tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.⁶⁹

TABELIV.8
Jawaban Penggarap Lahan:
Tempat Pemanfaatan Lahan Kosong Cukup Strategis

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	10	100
2	Tidak	-	-
3	Tidak sama sekali	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden 10 orang atau 100% penggarap lahan mengatakan ya cukup strategis karena, mereka sengaja melakukan pemanfaatan lahan kosong tersebut yang dekat dengan tempat tinggal mereka agar tidak terlalu berlebihan mengeluarkan biaya transportasi terkadang mereka hanya berjalan kaki.⁷⁰ Diambil sebagian dari responden yang bernama Bapak Amir Mahmud, Jegu, Darmadi dan Bapak Mihad, mereka berusia sekitar 35-65 tahun bertempat tinggal pada satu desa dan keseluruhan responden beragama Islam dengan pendidikan terakhirnya SD-SLTP.

⁶⁸ Ahmad Sopandi, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

⁶⁹ Jumiati, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

⁷⁰ Yumi, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong

Kendala atau problematika merupakan bagian kehidupan. Sebagai makhluk sosial, tanpa kendala atau problematika justru hidup menjadi tidak bermakna. Keberhasilan yang diperoleh melalui berbagai tantangan hidup dengan perjuangan dan pengorbanan sekecil apapun membuat seseorang bisa menghargai kehidupan itu sendiri apalagi jika dilakukan pada saat yang tepat dan diberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kendala atau problematika adalah suatu permasalahan yang dihadapi dan harus dicarikan solusinya.

Prinsip bagi hasil merupakan sistem mitra atau kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap atau pengelola. Dalam sistem pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan tersebut.

Adapun yang menjadi kendala dalam pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.9
Jawaban Penggarap Lahan: Kendala Yang Dihadapi
Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Kurangnya modal	-	-
2	Kurangnya lahan	8	80
3	Kurangnya tenaga	2	20
	Jumlah	10	100%

Sumber Data: Olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada yang mengatakan kurangnya modal, 8 orang atau 80% mengatakan kurangnya lahan dari responden yang bernama Bapak Amir Mahmud, Jego, Darmadi, Yumi, Mihad, Jumiaty, Slamet, Rohmat dan 2 orang atau 20% mengatakan kurangnya tenaga dari responden yang bernama Bapak Mihad dan Darmadi, mereka berusia

antara 35-65 tahun yang bertempat tinggal satu desa dan keseluruhan beragama Islam serta pendidikan terakhirnya SD-SLTP. Hal ini terjadi karena penggarap lahan merasa kekurangan lahan dikarenakan lahan yang digarapnya terbatas sedangkan kemampuan untuk menggarapnya ada, apalagi hasilnya harus dibagi dua ataupun bagi tiga untuk si pemilik lahan, sedangkan kurangnya tenaga dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua).⁷¹

Pemanfaatan lahan kosong ini sudah cukup lama dilakukan masyarakat Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sehingga hal itu sudah biasa mereka lakukan, namun terdapat juga perselisihan yang terjadi antara pemilik lahan dan petani penggarap yang kadang kala berselisih pada pembagian hasil pertanian yang didapat karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL IV.10
Jawaban Penggarap Lahan:
Tentang Perselisihan Selama Pemanfaatan
Lahan Kosong

No	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	4	40
2	Tidak	6	60
3	Tidak pernah	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber data: olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sri Gading mengatakan 4orang atau 40% mengatakan ya, dari responden yang bernama Bapak Amir, Darmadi, Ahmad Sopandi, dan Jego 6 orang atau 60%

⁷¹ Jego, Penggarap Lahan, Wawancara, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

mengatakan tidak dari responden yang bernama Bapak Samud, Aripin, Rusli dan tidak ada yang mengatakan tidak pernah, mereka berusia antara 35-65 tahun bertempat tinggal satu desa yang sama kecuali Bapak Samud yang tinggal di Kerinci seluruh responden beragama Islam dan pendidikan terakhirnya SD-SLTP. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak adanya kejujuran dari pihak petani, sehingga mempengaruhi pembagian hasil, karena pemilik lahan mendapatkan bagian kurang dari semestinya.⁷²

Hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau bahkan menguntungkan para pihak, sedangkan reaksi negatif adalah yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan.

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik akan

⁷²Ahmad Sopandi, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Desa Sri Gading, Tanggal 6 Januari 2013.

diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak-pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa atau perselisihan menjadi besar.

Setiap manusia mempunyai tujuan dalam hidupnya. Dalam mencapai hal tersebut, manusia akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Kebutuhan hidup manusia bersifat harus dipenuhi sebab tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya, yaitu pemenuhan akan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Kebutuhan setiap manusia berjenjang. Dalam arti, setelah satu kebutuhan terpenuhi manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya.⁷³

Adanya usaha untuk mencapai tujuan masing-masing, terkadang akan berdampak pada persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Untuk dapat

⁷³ M. Manullang dan Marihot AMH, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2008), Cet. ke-4, h. 173-174.

menghindarkan diri dari resiko tersebut masing-masing pihak akan berupaya mencari jalan yang dapat dilakukan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian. Terdapat dua cara, yakni dengan membawa sengketa tersebut diluar pengadilan (non litiigasi).

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan, berarti penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Demikian sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sehingga harus memaksa pihak lainnya untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan tidak berdasarkan kehendak dari para pihak atau ada unsur paksaan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase diantara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul diantara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Tentunya dapat menimbulkan sengketa diantara para pihak lainnya. Dapat terjadi salah satu pihak berargumen prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dapat dijalankan disebabkan adanya faktor

yang tidak terduga atau dengan berbagai macam alasan lainnya. Argumen ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak lainnya yang menderita kerugian dan tetap memaksakan pihak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk bersegera mungkin melaksanakan kewajibannya.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pemanfaatan Lahan Kosong di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak

Sebagaimana kita yakini bahwa syari'at Islam adalah syari'at yang bersifat universal lagi komprehensif. Mengatur segala kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan dengan masalah aqidah, ibadah, muamalah, dan masalah sosial lainnya, maupun hal-hal yang berhubungan khususnya masalah pemenuhan tuntunan hidup atau yang sering disebut problema ekonomi.⁷⁴

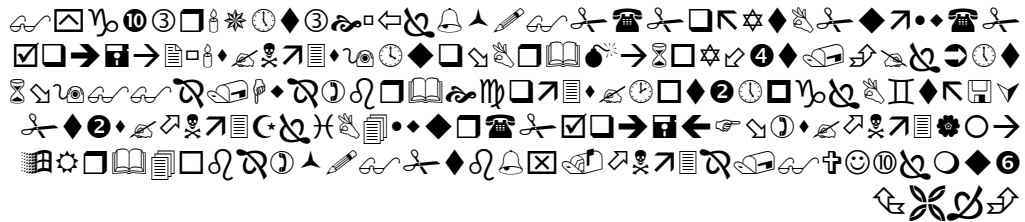
Sebagai ekonomi yang bertuhan, maka ekonomi Islam dengan mengakses kepada aturan-aturan ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak lepas dan nilai yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.⁷⁵

Mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam, dalam Al-Qur'an ditunjukkan pula bagaimana cara manusia seharusnya dalam memenuhi kebutuhannya tersebut baik secara jelas maupun secara tersirat. Disamping itu diberikan pula bermacam cara yang benar untuk ditempuh

⁷⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan oleh h. Imam Saefudin, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

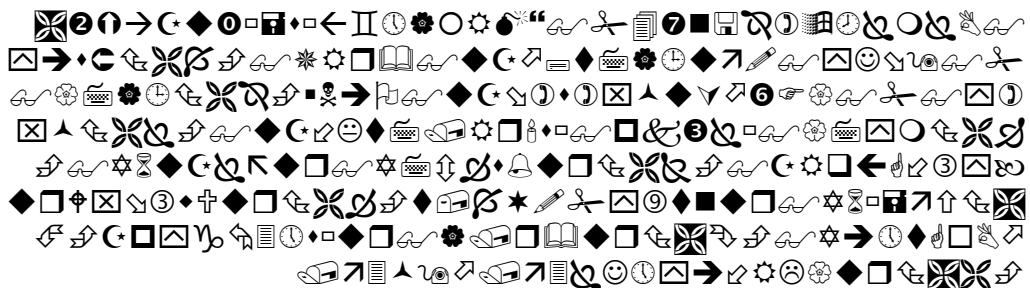
⁷⁵ Bambang R. Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendekiawan Perss, 2004), Cet. ke-1, h. 1.

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, ringkasnya telah diberikan pedoman oleh Allah kepada manusia bagaimana cara yang dihalalkan oleh agama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-nissa (4):29



Artinya: *hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*

Dan firman Allah pada QS. Abasa (80): 24-32,



Artinya: *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,. Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma,. Kebun-kebun (yang) lebat,. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.*

Dari ayat diatas telah jelas kita lihat bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta sesama manusia lain dengan cara yang bathil, dan Allah juga mengisyaratkan kepada manusia agar mengolah alam ini terutama

tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menanam berbagai macam tanaman.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan baik itu melalui observasi, wawancara, serta dengan menyebarkan angket kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan pada karya tulis ini, penulis berpendapat bahwa sistem pemanfaatan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sri Gading secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqhi, hal ini disebabkan oleh masyarakat Desa Sri Gading yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bernaungan agama. Akan tetapi secara teori, mereka belum mengetahui dan bahkan tidak mengetahui sistem dan pola bagi hasil pertanian yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak.

Ada empat bentuk akad pemanfaatan lahan kosong yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sri Gading yaitu: 1). Sistem Sewa, 2). Sistem bagi dua/paraan, 3). Sistem bagi tiga, 4). Sistem tolong-menolong/pinjam gratis.

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa akad sewa dalam ekonomi Islam disebut dengan Ijarah dan sistem sewa yang terjadi dalam pertanian di Desa Sri Gading hanya bersifat pemindahan hak atas pengelolaannya bukan pemindahan hak atas kepemilikan. Jadi sudah sesuai menurut ekonomi Islam sebab si pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada si pengelola lahan kemudian si pengelola memberikan uang kepada pemilik

lahan secara tunai sebagai pengganti atas tanah yang disewanya maka si pengelola sudah mempunyai hak untuk mengelolanya, menikmati hasilnya serta berkewajiban menjaga tanah tersebut. Sehingga sistem pemanfaatan lahan kosong ini dibolehkan dalam ekonomi Islam. Kendala yang dialami pada sistem ini yaitu kurangnya lahan yang disewa.

Sistem bagi dua atau paroan yang dilakukan masyarakat Desa Sri Gading sudah sesuai pada akadnya tetapi terdapat kejanggalan pada pembagian hasil karena bagi dua yang terjadi berdasarkan pembagian lahan yang dibagi dua dan belum dipanen yang masih diladangnya. Sehingga sistem ini belum sesuai dengan ekonomi Islam karena dalam ekonomi Islam pembagian hasil pertanian bukan dari bagi dua lahan melainkan bagi hasil pertanian dari yang dihasilkan sehingga sistem bagi lahan ini dilarang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan AlSyabani, yang dikutip dari bukunya Nasrun Harun mengenai bentuk-bentuk *Muzara'ah* yang dianggap sah yaitu jika pemilik lahan menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan alat pertanian dan tenaga kerja sehingga yang menjadi objek *Muzara'ahnya* adalah pemanfaatan lahan.⁷⁶

Begitu juga halnya dengan sistem bagi dua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading, yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja sedangkan mengenai alat pertanian dan obat-obatan disediakan oleh petani penggarap, sistem bagi dua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading juga sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu bibit yang

⁷⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 279.

disediakan boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani penggarap. Begitu juga halnya di Desa Sri Gading yang mana bibitnya disediakan pemilik kebun sehingga petani penggarap hanya tinggal menggarapnya saja, mengenai hak dan kewajiban pengelola yaitu menjaga, merawat tanah tersebut dengan menanaminya sebaik mungkin agar menghasilkan, serta berhak memanfaatkan tanah tersebut. Tetapi terdapat kegagalan pada bagi dua lahan pertanian karena tidak jelasnya jumlah hasil yang dibagi, karena bagi hasil pertanian berdasarkan bagi dua lahan atau lahannya dibagi menjadi dua, sedangkan dalam ekonomi Islam tidak dibolehkannya bagi dua atas lahan melainkan bagi hasil pertanian dari yang dihasilkan. Karena bisa jadi lahan yang separohnya tidak memiliki hasil yang baik, sehingga pihak yang mendapatkannya akan dirugikan. Sebagaimana hadist berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَهَا لِمَدِينَةِ حَقْلًا وَكُنَّا حَدَثًا بِكَرْبَارِضٍ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِهَؤُوهَذَا لَكَ. فَرُبَّمَا خَرَجَتْهُ هَوْلًا مِّنْ خَرَجِهِمَا لَيْسَ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Rafi’ bin Khudaij, ia menuturkan, ”kami termasuk golongan Madinah yang paling banyak memiliki kebun. Dahulu kami biasa memperkerjakan orang untuk menggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya bagian yang sebelah sini yang menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak, kami tidak larang.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).⁷⁷

Adapun mengenai hal-hal yang mungkin terjadi selama penggarapan berlangsung seperti bencana banjir atau kebakaran yang mana tidak terdapat ganti rugi, hal tersebut tidaklah membatalkan akad *Muzara’ah* yang syah.

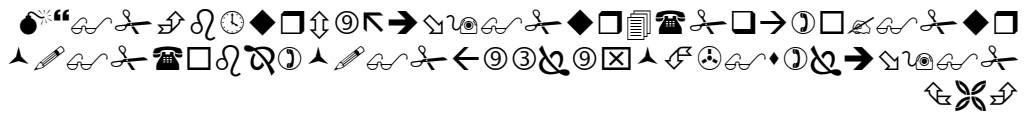
⁷⁷Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz. 2, (Beirut: Dar Ibnu Katsir. 7987), h. 821.

Sebab dalam sistem bagi dua/paroon ini kedua belah pihak bersama-sama menanggung biaya, sehingga keduanya mendapat bagian dari hasil kebun begitu juga kerugiannya.

Selanjutnya dalam sistem bagi tiga dalam ekonomi Islam dapat juga disebut *Muzara'ah*, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading sudah sesuai dengan bagi hasil dalam ekonomi Islam karena dalam pembagian hasil tersebut yang dibagi berupa hasil pertaniannya tidak berdasarkan bagi tiga lahannya, yang mana pemilik lahan mendapatkan 1/3 dari hasil kebun. Mengenai hak dan kewajibannya masih sama dengan sistem bagi dua yaitu berhak mengelola tanah tersebut dan berkewajiban menjaga tanah dengan baik. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam sistem bagi tiga ini adalah kurangnya lahan pertanian karena penggarap harus membagi tiga hasilnya kepada pemilik lahan padahal memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Pada sistem ini juga terdapat unsur ta'awunnya seperti sistem tolong-menolong/pinjam gratis.

Adapun yang terakhir yaitu sistem tolong-menolong/pinjam gratis yang dalam ekonomi Islam tergolong pada sistem *Ariyah* yang mana tujuan dasarnya adalah rasa saling tolong-menolong dan saling membantu, maka sangat jelas kesesuaiannya dengan konsep ekonomi Islam, karena dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia dan bahkan tidak boleh membiarkan tetangganya atau saudaranya kelaparan sedangkan kita berkecukupan, sebagaimana yang terlampir dalam Al-Qur'an; (QS.Al-Maidah: 2)





Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit maupun banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semata untuk kepentingan pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

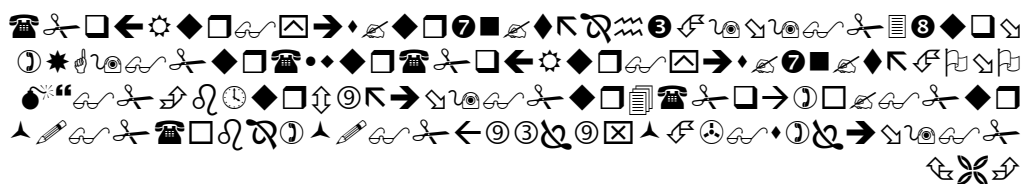
Dalam sistem tolong-menolong/pinjam gratis yang dilakukan masyarakat Desa Sri Gading ini yang mana pada sistem *Ariyah*, pihak pertama meminjam lahan kosong kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dan dia mendapatkan hasil dari kebun. Begitu juga pada sistem tolong-menolong, petani penggarap meminjam lahan kepada pemilik kebun untuk dikelola dan dia mendapatkan hasil dari kebun tersebut. Mengenai hak dan kewajiban penggarap yaitu boleh memanfaatkan lahan, menjaga lahan tersebut serta menikmati hasilnya. Kendala yang dihadapi dalam sistem ini yaitu kurangnya tenaga yang cukup dikarenakan faktor usia.

Pada umumnya praktek pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading tersebut semuanya telah sesuai dengan akad

pemanfaatan lahan kosong dalam ekonomi Islam, kecuali pada sistem bagi dua atau parogan yang mana pembagian hasil pertanian yang terjadi berdasarkan pembagian lahan yang dibagi dua dan belum dipanen yang masih diladangnya. Sehingga sistem ini belum sesuai dengan ekonomi Islam karena dalam ekonomi Islam pembagian hasil pertanian bukan dari bagi dua lahan melainkan bagi hasil pertanian dari yang dihasilkan sehingga sistem bagi lahan ini dilarang.

Secara umum landasan dasar syariat bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 dimana ayat tersebut menjadi argumen sekaligus sebagaimana landasan operasional pembiayaan pelaksanaan modal dengan sistem bagi hasil.

Sistem pengelolaannya diukur secara demokrasi dan terbuka oleh karena itu operasionalnya baik itu dalam memanfaatkan lahan kosong dapat dibenarkan bahkan dianjurkan oleh Islam untuk tegaknya prinsip-prinsip tolong-menolong, yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa merupakan pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an, karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik individu maupun kelompok, baik perkara agama dan dunia.

Pada masa pertama kaum muslimin sudah mampu bertolong-tolongan sesamanya dalam melakukan takwa, tanpa memerlukan suatu ikatan perjanjian, tetapi mereka cukup diikat dengan janji dan sumpah dengan nama Allah SWT saja. sekarang ini jarang melihat orang yang mau menolong melakukan pekerjaan kebajikan, kecuali orang itu ada ikatan janji untuk suatu tujuan tertentu.

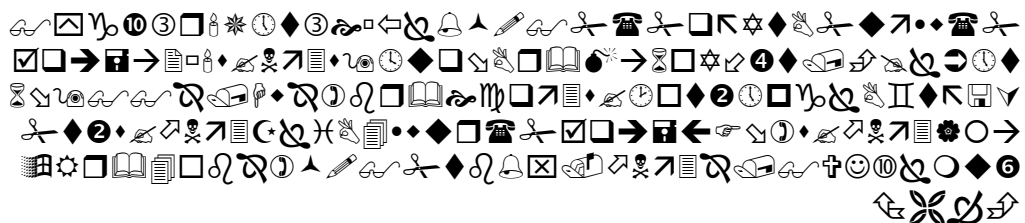
Dalam Islam tanah merupakan milik bersama demi pemanfaatannya yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, karena itu pemilik dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan mengesampingkan sebahagian masyarakat, bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an. Dalam ekonomi Islam tiada seorangpun yang dapat menuntut pemilik tanah meminta secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT.

Dalam Islam bekerja dianggap sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Nabi berkata: ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah menegur seorang yang malas dan meminta-minta seraya menunjukkan kepadanya jalan kearah kerja produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil

penjualannya untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu bakar ditempat dan bebas menjualnya kepasar. Beliauapun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya berkat kerja produktif. Kehidupan dinamis adalah proses menuju peningkatan, ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia sebagai pacuan dengan waktu, dengan kata lain kebaikan dan kesempurnaan diri merupakan tujuan-tujuan dalam proses ini.

Pembagian hasil produksi pemanfaatan lahan kosong di Desa Sri Gading sudah dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam. Dalam muamalah, Islam menjunjung tinggi keadilan yang merupakan salah satu dasar teori ekonomi adil diartikan dengan “*La Tazhlim Wa La Tuzhlam*” (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Untuk menegakkan prinsip adil ini maka praktek Riba, Gharar, dan Maisir harus dihilangkan. Berdasarkan pemaparan diatas, pada dasarnya

aktivitas bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat Desa Sri Gading itu dibolehkan oleh agama dan begitu juga dengan pendapat para ulama fiqh, dari responden penelitian yang telah penulis dapatkan bahwa tidak merasa keberatan dengan perjanjian yang mereka sepakati dengan pemilik lahan, karena dari angket yang penulis berikan kepada responden mereka merasa terbantu dengan adanya pemanfaatan lahan kosong dikampung mereka yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dan tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat bagi hasil dalam Islam.

Dalam Islam sistem bagi hasil itu dibolehkan bahkan dianjurkan karena terdapat saling tolong-menolong sesama umat Islam, walaupun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading tersebut. Tapi pada prinsipnya bagi hasil yang dilakukan oleh mereka berlandaskan "*Antarodhim Minkum*", inilah yang menjadi pokok utama, dan inilah yang diyakini oleh pemilik lahan dan penggarap lahan.

Walaupun dalam Islam dibolehkan melakukan bagi hasil tetapi harus dilakukan dengan adil diantara kedua belah pihak yang melakukan pemanfaatan lahan kosong, tidak ada yang merasa dizalimi atau dirugikan dalam pemanfaatan lahan kosong tersebut. Kalau kita melihat bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan niat baik namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para pemilik lahan terhadap sistem bagi hasil dalam Islam itu seperti apa.

Hal ini disebabkan tingkat pendidikan para pemilik kebun yang tergolong rendah, namun sebenarnya ini tidak menjadi permasalahan diantara

mereka, mereka melakukan ini dengan ikhlas dengan niat membantu sesama mereka dengan jalan bagi hasil diantara mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada empat bentuk sistem akad pemanfaatan lahan kosong yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sri Gading yaitu: (1). Sistem Sewa, (2). Sistem bagi dua/paroan, (3). Sistem bagi tiga, (4). Sistem tolong menolong/pinjam gratis.
2. Adapun yang menjadi kendala dalam sistem pemanfaatan lahan kosong ini yaitu kurangnya lahan dikarenakan lahan yang digarapnya terbatas sedangkan kemampuan untuk menggarapnya ada, apalagi hasilnya harus dibagi dua ataupun bagi tiga untuk si pemilik lahan, kurangnya tenaga dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua) dan kendala yang terakhir adanya perselisihan, perselisihan yang terjadi selama kerjasama antara pemilik lahan dengan petani ini dikarenakan kurangnya keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi

pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani.

3. Berdasarkan ekonomi Islam pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai, pemanfaatan lahan kosong yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu sistem sewa, sistem bagi ⁷⁶ ~~tiua~~ dan sistem tolong menolong/pinjam gratis, sedangkan yang tidak sesuai yaitu sistem bagi dua karena bagi dua yang terjadi berdasarkan pembagian lahan yang dibagi dua dan belum dipanen yang masih diladangnya. Sehingga sistem ini belum sesuai dengan ekonomi Islam karena dalam ekonomi Islam pembagian hasil pertanian bukan dari bagi dua lahan melainkan bagi hasil pertanian dari yang dihasilkan sehingga sistem bagi lahan ini dilarang dan pihak yang mendapatkan akan dirugikan karena bisa jadi lahan separohnya mempunyai hasil yang tidak baik.

B. Saran-saran

Karena sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sri Gading sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu perlu dipertahankan dari generasi ke generasi.

Karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem pertanian yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu kepada para ekonomi Islam perlu memperkenalkan secara mendalam lagi tentang bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Menanamkan kepada jiwa para pemuda bahwa bertani tidak akan mengurangi harkat dan martabat manusia, bahkan ini akan menghindarkan atau mengurangi tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1986. *Kitab A-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al Fikr.
- Al-San'ani. *Subul Al-Salam*. Bairut: Darl Al-Fikr, t, tth. Jilid. 1.
- AM Syaefuddin. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. Cet. II.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1996. *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute.
- _____, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Instut.
- _____, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. Cet. 1.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Juz.5 (Beirut: Dar al-Jail.tt).
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I.
- M, Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- M. Manullang, Marihot AMH. 2008. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gajah Mada University. Cet. IV.
- Muh, Said. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan*. Riau: Suska Press.
- Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz 8 (Mesir: Wuzarah al-Auqaf.tt).
- Muhammad, Al-Assal, Ahmad. 1999. *Sistem ,Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. terjemahan h. Imam Saefudin, Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Muslich. 2007. *Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: YKPN.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 1.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Dokrin Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul asli, *Economic Doctrines of Islam*, oleh Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensido.
- Rustam, Bambang R. 2004. *Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Mumtaz Cendekiawan Perss. Cet.1.
- Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), Cet. ke-1, h. 3.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. Cet. V.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Wali Pers. Cet. 1.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taqiyuddin, Imam. 2007. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV. Bina Iman.
- Ya'qub Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yasin, Fahri. 2003. *Agribisnis Riau Perkebunan Berbasis Kerakyatan*. Pekanbaru: Unri Press. Cet. 1.

ANGKET PENELITIAN

Petunjuk pengisian:

Pertanyaan ini semata-mata hanya untuk penelitian ilmiah,

1. Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat diharapkan.
2. Identitas dan semua kerahasiaan akan terjaga.
3. Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan yang harus dijawab dan sesudah saya ucapkan terima kasih.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
4. Desa/Kelurahan :
5. Pendidikan terakhir :

Daftar Pertanyaan :

1. Sudah Berapa lama anda memanfaatkan lahan kosong tersebut?
 - a. 1-5 Bulan
 - b. 5-12 Bulan
 - c. 1-5 Tahun

2. Apakah anda melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan sebelum melakukan pemanfaatan lahan kosong ini?
 - a. ya
 - b. Tidak
 - c. Langsung pakai
3. Dalam bentuk apa saja perjanjian yang dilakukan ketika anda melakukan pemanfaatan lahan kosong?
 - a. Tertulis
 - b. Tidak tertulis (saling percaya)
 - c. Tidak ada
4. Bagaimanakah sistem yang digunakan dalam pemanfaatan lahan kosong ini?
 - a. Sewa
 - b. Bagi hasil
 - c. Pinjam pakai/gratis
5. Apakah anda merasa terbantu dengan lahan yang dimanfaatkan tersebut?
 - a. Sedikit membantu
 - b. Sangat membantu
 - c. Tidak membantu
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang

7. Apakah tempat pemanfaatan lahan yang anda lakukan cukup strategis?
- a. ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak sama sekali
8. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam pemanfaatan lahan kosong tersebut?
- a. Pemilik lahan
 - b. Penggarap lahan
 - c. Kedua belah pihak
9. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan kosong ini?
- a. Kurangnya modal
 - b. Kurangnya lahan
 - c. Kurangnya tenaga
10. Apakah pernah terjadi perselisihan selama pemanfaatan lahan kosong tersebut?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak pernah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama anda melakukan pemanfaatan lahan kosong ini untuk di garap orang lain?
2. Apa yang menjadi alasan pemilik lahan untuk melakukan pemanfaatan lahan kepada orang lain?
3. Apakah ada nama lain dari sistem pemanfaatan lahan kosong tersebut?
4. Bagaimana pelaksanaan sistem pemanfaatan lahan yang dilakukan?
5. Bagaimana sistem pembayaran atau bagi hasil yang di lakukan?
6. Apa saja hak-hak pengelola dalam melakukan pemanfaatan lahan kosong?
7. Apa saja hak-hak pemilik lahan dalam perjanjian pemanfaatan lahan tersebut?
8. Apa yang menjadi kewajiban pengelola dalam pemanfaatan tersebut?
9. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pemanfaatan lahan kosong ini?